

40 TAHUN PEMBAHARUAN ISLAM: SEBUAH UNGKAPAN DAN SEKIAN TANTANGAN*

TAUFIK ABDULLAH
Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Sebuah Ungkapan, sebuah Kejutan

Bukankah sebuah ironi sejarah telah terjadi ketika sesuatu hal yang sederhana saja bisa menyentak kesadaran? Kisah sejarah tak jarang menyampaikan betapa sebuah kejadian yang sederhana dan bersahaja mencetuskan riak sosial-politik yang luar biasa, sedangkan kejadian lain yang tampaknya gegap gempita hanya berhenti pada dirinya tanpa meninggalkan kesan, jangankan dampak kesejarahan yang berarti.

Tetapi, memang, kalau dipikir-pikir, bukankah ironi selalu mengugah kesadaran? Ironi adalah kasus ketika keharusan logika yang sederhana seakan-akan dibiarkan tak berfungsi. Ironi seakan-akan mempertentangkan keharusan logika dengan realitas empiris. Karena itu, bisalah dipahami kalau ironi sejarah adalah kasus ketika peristiwa masa lalu yang dikisahkan terasa sebagai sesuatu yang kini masih dilalui. Sebuah pernyataan sederhana, bahkan ungkapan yang biasa saja, umpamanya, dapat menimbulkan kesan yang keras dalam struktur kesadaran masyarakat. Seketika pernyataan itu menyebar, maka seketika itu pula sesuatu terjadi dalam kesadaran, bahkan tak pula jarang dalam corak perilaku masyarakat. Sebaliknya, berapa banyak pidato panjang yang berapi-api atau perayaan kebesaran yang serba mewah, dan bahkan keributan sosial, atau entah bentuk kejadian apalagi, hanya berhenti pada dirinya saja. Sekali terjadi, kemudian berlalu begitu saja. Teringat mungkin, tetapi hanya sekadar tidak terlupakan karena sempat tercatat. Maka jadilah kejadian itu sebagai bagian saja dari mata rantai peristiwa utama yang dikisahkan sejarah.

Sebuah contoh yang telah sangat umum diketahui mungkin bisa diingatkan juga. Kalimat-kalimat dalam pernyataan “Proklamasi Kemerdekaan”, umpamanya, sebenarnya biasa saja. Tidak ada kata-kata yang muluk-muluk dan tidak pula ada lontaran pemikiran yang mendalam. Semuanya sederhana saja, jika saja proklamasi itu hanya dibaca dan didengar sebagai teks saja – “dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”. Betapa biasa susunan kata-kata dalam ucapan ini. Tetapi disampaikan oleh dua pemimpin yang berani menyatakan diri sebagai “wakil bangsa Indonesia”, di saat suasana kemungkinan akan terjadinya peralihan kekuasaan kolonial di Tanah Air sedang sangat keras dirasakan dan ketika hasrat kemerdekaan telah mendidih, pernyataan sederhana ini serta merta menjadi pertanda dimulainya revolusi nasional.

Begitulah, ketika suatu pernyataan disampaikan atau suatu perbuatan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai wibawa yang didukung oleh harapan sosial yang tinggi

* Disampaikan sebagai orasi ilmiah dalam rangka memperingati “40 Tahun Pembaharuan Islam di Indonesia”, pada Kamis, 7 Januari 2010, di Auditorium Nurcholish Madjid, kampus Universitas Paramadina, Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Paramadina.

dalam suatu konteks waktu yang kritis pula, maka semua yang sederhana pada diri masing-masing itu menimbulkan riak yang penting dalam gejolak kehidupan masyarakat. Bahwa “Proklamasi Kemerdekaan” adalah sebuah contoh yang ekstrim dan tak mungkin terulang lagi semua tentu telah maklum juga. Seketika proklamasi itu dikumandangkan berbagai faktor yang penting dan menentukan – pemimpin, situasi zaman peralihan, isi pernyataan, suasana hati masyarakat, kenangan sejarah, penderitaan hari ini yang dirasakan, harapan masa depan dan sebagainya – dengan begitu saja saling menemukan afinitas yang akrab. Maka terjadilah apa yang harus terjadi.

Tetapi bagaimana halnya dengan sebuah ungkapan pendek dari sebuah ceramah panjang Drs. Nurcholish Madjid, anak seorang kiyai pemilik dan guru utama sebuah pesantren dan seorang tamatan IAIN serta mantan ketua HMI? Dari ceramahnya itu, sebuah pernyataan pendek, bahkan teramat pendek, dan ternukil dalam bahasa gado-gado dengan struktur tata bahasa yang juga tidak menurut ketentuan yang baku, masih juga tidak lekang dari ingatan. Ungkapan yang diucapkan dalam ceramah pada tanggal 3 Januari 1970 itu ialah “*Islam yes, partai Islam no*”. Seketika diucapkan orang pun lupa argumen panjang yang diajukannya tetapi tetap ingat akan ungkapan pendek yang ternukil dalam struktur bahasa yang kacau ini. Lebih penting lagi, pernyataan yang teramat pendek ini menimbulkan riak politik dan intelektual yang sampai kini masih enggan saja untuk berhenti.

Tetapi terlepas dari gaya yang agak “*nyentrik*”, apakah sesungguhnya yang baru dalam ungkapan sederhana ini? Meskipun dengan memakai kata-kata lain dan alur argumen yang berbeda-beda, maksud yang termaktub dalam ungkapan ini sebenarnya telah lama, bahkan sudah sejak hasrat kemerdekaan diucapkan dan cita-cita berdirinya sebuah negara–bangsa, menjadi bahan perdebatan yang seakan-akan enggan berhenti. Dalam perdebatannya dengan Haji Agus Salim dan kemudian dengan Natsir, Sukarno telah melontarkan pemikiran yang ingin melepaskan negara dari keterikatannya dengan agama dari mayoritas anak bangsa. Perdebatan yang paling gencar dalam sidang-sidang BPUPKI di bulan Mei-Juli 1945 juga berkisar di sekitar masalah tempat Islam dalam negara Indonesia yang merdeka. Jika dilupakan saja perdebatan ideologi dan persaingan partai-partai di tahun 1950-an dan bahkan juga tanpa harus pula mengingat kemacetan sidang Dewan Konstituante untuk menentukan landasan negara sehingga memberi kesempatan bagi Presiden Sukarno untuk mengeluarkan dekrit untuk “kembali ke UUD 1945”, wacana yang dikembangkan bahkan juga perilaku politik yang diperlihatkan oleh Orde Baru yang baru berdiri telah menunjukkan bahwa ungkapan yang disampaikan Cak Nur itu adalah sikap ideologi dan politik yang diinginkan. Kalau demikian halnya mengapa ungkapan sederhana tersebut sampai kini masih juga bergaung? Bahkan seperti yang kini kita alami, tanggal ketika ia mengucapkannya dirasakan pula sebagai saat pantas juga untuk diingat.

Barangkali jawab sederhana yang bisa disampaikan ialah bahwa dengan mengucapkan kata-kata itu Cak Nur bukan saja dengan tegas membebaskan dirinya dari harapan sosial – *social expectation* – yang telah membelenggunya – atukah yang telah dinikmatinya? – tetapi juga sekaligus ingin meletakkan landasan wacana baru dalam pemikiran politik Islam di tanah air. Ia yang berasal dari dunia pesantren, yang dianggap telah mempunyai sistem wacana tertentu dan juga memiliki asumsi politik yang telah pula dianggap baku, kini tampil dengan pernyataan yang sama sekali berada di luar harapan sosial dan bahkan ikatan kultural yang telah sekaligus

membesarkan dan membelenggunya. Ungkapan sederhana yang disampaikannya dengan begitu saja menyeruakkan pertikaian antara harapan sosial dengan perwujudan peran sang pelakon. Ia yang telah mempunyai reputasi cemerlang sebagai seorang pemikir muda Islam dan yang diharapkan tampil untuk menjadi perumus baru dari alur dan perilaku politik Islam dalam konteks politik Orde Baru yang telah melancarkan ofensif ideologi yang anti-ideologi, malah tampak sebagai pembela dari orientasi politik dan ideologi dari rezim yang didominasi militer ini. Di waktu ungkapan singkat yang kini telah dianggap historis itu diucapkan, Orde Baru telah memperlihatkan kecenderungan yang memperlakukan kekuatan politik Islam sebagai lawan yang perlu dihadapi, setelah PKI dihancurkan dalam suatu drama yang traumatis dan para pendukung Sukarno-isme telah dijadikan pula tidak lagi berdaya. Tetapi apakah yang terjadi?

Apakah ungkapan singkat itu adalah pertanda telah hilangnya idealisme politik ke-Islam-an, yang didukung oleh landasan dan kesadaran etik yang tinggi dan munculnya realisme politik yang menjadikan politik tidak lebih daripada wilayah tempat bermainnya adegan “*who gets what and how*”, di kalangan generasi muda? Ataukah sikap ini adalah sesungguhnya pertanda bahwa waktunya sudah sampai untuk memulai tahapan baru setelah sekian banyak kegagalan politik Islam telah dan tampaknya masih harus dilalui? Apakah ini berarti pembebasan dari nostalgia akan suasana dan wacana lama yang sempat menggairahkan ataukah pertanda lahirnya suatu realisme politik yang rasional yang didasarkan pada cita-cita yang telah pula mengalami pembaharuan? Tetapi di atas segala-galanya pernyataan itu serta merta menggugah hal yang paling fundamental dalam teori politik Islam – “apakah negara Islam adalah suatu keharusan jaran agama atau hal ini hanyalah bagian dari perkembangan sejarah?” Kalau masalah ini telah dibuka maka siapakah yang bisa mengelak dari keharusan untuk mendalami ajaran Islam yang sesungguhnya?

Nurcholish Madjid tidaklah sendirian. Ia adalah perumus dari suasana perasaan dan pemikiran yang telah mulai bersemi di hati sebagian kalangan mereka yang sering dianggap dan menganggap diri sebagai “generasi muda Islam”. Betapapun canggihnya alur argumennya, ternyata juga kemudian bahwa ucapan Cak Nur adalah pantulan dari kegelisahan untuk mencari sesuatu yang baru. Tetapi justru kegelisahan intelektual dan politik inilah yang menimbulkan keprihatinan.

Tanpa dimaksud mungkin tetapi ceramah Cak Nur adalah sebuah deklarasi bahwa semacam *generation gap* di kalangan pendukung orientasi politik Islam telah terjadi. Di saat Orde Baru mulai melancarkan gebrakan “pembangunan nasional”, yang anti-ideologi dan cenderung pula mencurigai partai politik, perpecahan generasi di kalangan cendekiawan yang menjadikan Islam sebagai rujukan utama telah terkuak. Bisalah dibayangkan kekecewaan generasi lama, yang telah menjalani pahit getir penderitaan karena disisihkan dari percaturan politik bahkan diasingkan dari masyarakat oleh rezim yang “serba revolusioner”, yaitu Demokrasi Terpimpin, dan kini pun masih dicurigai oleh rezim Orde Baru yang tampil dengan gaya “serba pembangunan”. Pernyataan pendek Cak Nur terasa sebagai sebuah pengumuman bahwa segolongan generasi muda Islam yang diharapkan telah meninggalkan mereka. Tetapi apakah peristiwa ini hanyalah sekadar pertanda bahwa sejarah memang bisa berulang, meskipun dalam bentuk dan corak yang berbeda?

Baiklah sehelai lembaran sejarah dibuka sejenak. Di awal abad 20, ketika budaya cetak telah menjadi bagian dari realitas hidup keseharian di kota-kota kolonial, dan di waktu seruan “kemajuan” telah menjadi wacana yang semakin meluas, beberapa ulama muda menyuarakan *tajdid* dan menyerukan *ijtihad* dengan langsung menghadapkan diri pada Al-Qur’an dan Hadith. Dengan begini mereka telah meninggalkan para ulama tua – guru-guru mereka – yang mereka anggap masih *taqlid* kepada tradisi. Dengan seruan *tajdid* mereka ingin membersihkan Islam dari segala bid’ah yang secara aqidah tidak syah dan segala hal yang dianggap khurafat dan takhyul dan sekaligus menjadikan Islam yang rasional dan murni sebagai landasan ideologis dari proses perubahan sosial. Dengan seruan ini mereka dapat memikat perhatian anak-anak muda yang berpendidikan Barat. Maka begitulah di tahun 1920-an para terpelajar Barat yang masih muda itu membawa pemikiran modernisme Islam ke dalam sistem wacana yang telah menjadi bagian dari kehidupan intelektual mereka. Para terpelajar Barat muda ini, yang menggabungkan diri dalam *Jong Islamieten Bond*, menjadikan alam pemikiran dan keprihatinan intelektual dan kultural Islam sebagai landasan utama sistem wacana modern mereka.

Jadi kalau dilihat dari segi sistem wacana saja bukankah adalah sesuatu yang menggembirakan kalau sekian puluh tahun kemudian pembalikan arus dari proses pemikiran terjadi pula? Para pemikir muda yang berasal dari tradisi pendidikan Islam kini penuh dengan percaya diri memasuki sistem wacana modern gaya Barat. Bukan pemikiran Barat yang dipakai untuk memahami Islam, seperti yang terjadi di tahun 1920-an, tetapi Islam yang dijadikan sebagai landasan dalam sistem wacana modern. Hanya saja ketika politik telah menjadi realitas yang tak terhindarkan maka pembalikan arus pemikiran ini menimbulkan keprihatinan intelektual dan politik yang mendalam juga. Bukankah hal ini bisa diartikan sebagai Islam telah kehilangan argumen akan keharusan kehadiran asumsi doktrin di ranah politik kenegaraan? Masalahnya menjadi sensitif juga pada waktu itu, demi kepentingan *the politic of survival* golongan ada yang menjelek orientasi politik “kaum sarungan”, dengan konotasi sebagai golongan yang terkebelakang dan ketinggalan zaman.

Proses reevaluasi pemikiran politik ini terjadi ketika peralihan kekuasaan baru saja dilalui dengan penuh kegetiran. Namun ketika ini pula karir Cak Nur sebagai pemikir politik bermula. Dengan perbendaharaan tradisi pemikiran dan wawasan Islam ia menyeberang ke wacana yang bersuasana lain tetapi dianggap modern. *Hasil dari keberaniannya untuk mengadakan eksplorasi kecendekiaan baru ini segera didapatkannya – ia tampil sebagai sebuah bintang dalam suasana wacana yang sedang membebaskan diri dari keterpukauan pada revolusi dan “kepribadian nasional”, yang pernah dipelihara Demokrasi Terpimpin.* Ketika ia tampil Orde Baru masih memperlihatkan suasana pencarian dan di saat Orde Baru sedang membebaskan diri dari keterpukauan serba-ideologi dan serba-revolusi yang dipelihara Demokrasi Terpimpin. Ketika inilah pemikiran para ahli ilmu politik dan ekonomi Barat sedang menjadi acuan dan di kala segala teori sosial sedang asyik pula dipelajari. Ia tampil sebagai seorang pemikir politik di waktu bangsa masih dibebani perasaan tercekam setelah terlepas dari tragedi sosial-politik yang paling traumatis di zaman modern dan di saat dendam sosial sesama anak bangsa masih teramat keras mencekam. Ia muncul ketika Orde Baru sedang memelihara suasana demokratis dalam perbenturan wacana politik. Cak Nur memperkenalkan dirinya di saat luka-luka dalam kehidupan bangsa masih terlalu perih dirasakan dan di waktu tatanan baru yang diharapkan tanpa

konflik sedang diirintis – entah dalam sistem demokrasi yang kreatif dan, siapa tahu, entah pula dalam sistem dominasi yang mengingkari keabsyahan kemajemukan pendapat.

Tetapi seketika Cak Nur tampil ia dengan begitu saja harus menghadapi resiko seorang intelektual muda Islam yang kreatif. Bukan saja alur berpikirnya dimasalahkan bahkan pilihan kata dan istilah yang dipakainya pun bisa memancing perdebatan yang sengit. Apakah “sekularisasi” suatu keharusan dalam kehidupan sosial-politik? Tetapi apa maksudnya dengan memakai kata yang menimbulkan kesan sebagai proses ketika suasana yang sakral sedang ditinggalkan? Memang di masa ketika pencarian suatu format wacana politik yang dianggap sesuai bagi negara yang sedang ingin menjalankan “akselerasi pembangunan” seakan-akan tidak ada kata kunci jangankan pernyataan yang dibiarkan berlalu begitu saja. Dalam situasi inilah Cak Nur meninggalkan tanah air. Ia pergi ketika peralihan dari “*a short Indian summer of democracy*” Orde Baru telah semakin mendekati pintu gerbang “*a long cold winter of authoritarianism*”.

Sebelum Cak Nur memutuskan untuk kembali menjadi mahasiswa, ia sempat memperlihatkan dirinya bahwa ia bukanlah alat yang bisa dimainkan oleh rezim yang berkuasa. Ia pergi belajar menambah ilmu di saat ia telah menancapkan diri sebagai pemikir yang diperhitungkan. Ketika ia kembali dari Universitas Chicago (1984), setelah sekian tahun bermukim di salah satu kampus yang terkemuka ini, Cak Nur tidak lagi seorang pemikir muda dengan latar belakang IAIN yang sedang mencoba berdialog dalam sistem wacana yang bernuansa Barat. Ia adalah seorang ilmuwan yang telah memperdalam pengetahuan tentang pemikiran Islam klasik dan terlatih dalam tradisi akademis modern. Jika sebagian besar ilmuwan Indonesia yang belajar di luar negeri – termasuk mereka yang kembali setelah kepulangan Cak Nur – menulis disertasi tentang Indonesia, Cak Nur dengan penuh percaya diri menceburkan perhatiannya pada pemikiran Islam klasik. Maka ketika waktunya telah sampai ia pun memberikan sumbangan dalam wilayah keilmuan ini. Di waktu itu ia menampilkan dirinya sebagai ilmuwan dan pemikir tentang berbagai masalah keagamaan, politik, sosial, atau apa saja. Ia adalah dirinya yang telah mengalami proses pematangan keilmuan dan pemikiran. Meskipun kadang-kadang ia masih disebut juga “cendekiawan muda” – sesuatu yang agak menjengkelkannya – Cak Nur telah menjadi seorang ilmuwan dan cendekiawan yang matang, baik dari segi keilmuan, maupun dari segi wawasan dan kepemimpinan.

Tetapi Cak Nur yang pulang ke Tanah Air bukanlah ia yang telah berubah dan yang telah menanggalkan segala hal yang telah dimulainya. Dengan kecanggihan keilmuan yang semakin tinggi dan wawasan keilmuan yang semakin luas, ia masih menghadapkan dirinya pada masalah hubungan cita-cita ke-Indonesia-an dengan idealisme ke-Islam-an serta hubungan keduanya dengan corak dan tuntutan dunia modern yang kosmopolitan. Ia tidak meninggalkan, bahkan semakin memperkuat, argumen akan keharusan sikap kultural yang pluralis, suasana batin yang toleran, pandangan politik yang demokratis, serta kesadaran sosial yang humanis dan adil. Kesemuanya itu harus dibungkus oleh ketakwaan yang tak bercela. Sebagai seorang yang telah menjelajahi wilayah dan tradisi pemikiran Islam klasik, ia pun mengadakan dialog intelektual yang kreatif dengan Orientalis. Karena itulah ia dengan penuh percaya diri bisa juga mendasarkan pandangan kesejarahannya pada hasil rekonstruksi dan penemuan para Orientalis itu.

Begitulah, Cak Nur yang pulang dari sebuah universitas Barat adalah ia yang tanpa sungkan menampilkan dirinya sebagai seorang ulama yang otentik dengan menghadapkan dirinya pada masalah kesalehan dan ketakwaan serta keharusan kehidupan pribadi yang tak bercela. Ketika itu pulalah ia semakin sadar akan pentingnya pilihan kata yang tepat dalam proses dialog. Tanpa harus mengulang perdebatan lama, ia pun memperbaiki dan meninggalkan kata dan konsep yang bisa bermakna jamak tetapi sempat dipakainya di awal karirnya sebagai pemikir Islam.

Begitulah, terlepas dari perluasan perhatian dan kedalaman ilmunya, Cak Nur tidak pernah meninggalkan keterpukauan intelektualnya pada usaha untuk menciptakan Indonesia yang modern dan demokratis yang disinari oleh nilai ke-Islam-an yang toleran, maju, terbuka dan adil. Bagaimanakah kesemuanya terpancar dalam kehidupan masyarakat tanpa negara menjadikan dirinya sebagai “penentu” corak dari ke-Islam-an itu? Dalam hal ini pulalah ia menemukan teman dialognya yang sepaham tetapi tak pula jarang bersimpangan jalan. Mungkin terasa agak berlebih-lebihan, tetapi ada suatu saat di mana suasana pemikiran ke-Islam-an diwarnai oleh irama persetujuan dan perbedaan pendapat antara dua pemikir Islam yang cemerlang – Cak Nur dan Abdurrahman Wahid. Wacana yang mereka perkenalkan memperkaya situasi keilmuan dan kecendekiaan di masa Orde Baru, suatu rezim yang telah menjelmakan dirinya sebagai sebuah negara serakah. Hanya saja, jika yang satu memancarkan pemikiran dan uraian yang sistematis dan akademis, yang lain lebih menawarkan sketsa-sketsa pemikiran yang serba ringkas tetapi cemerlang dan tidak jarang pula mengejutkan. Meskipun demikian, kecintaan mereka pada umat, Tanah Air dan bangsa, serta kemanusiaan yang beradab, dengan begitu saja bisa meniadakan perbedaan mereka.

Ketika Tantangan dan Tuntutan Sejarah Datang

Jika masa lalu diingat lagi, ternyata telah empat puluh tahun masa berlalu, ketika sebuah ungkapan yang sederhana menjadi pembuka sebuah perdebatan internal para pemikir Islam – seakan-akan “orang luar” hanya berhak untuk sebagai pemerhati saja. Apakah yang tidak terjadi dalam masa empat dekade itu? Harapan apakah yang terpenuhi dan kekecewaan apa pulakah yang tidak dirasakan? Ada saat-saat ketika suasana terasa berjalan sangat pelan – malah terlalu pelan – tetapi ada pula saat ketika hari bahkan jam terasa sebagai mengubah “sesuatu” kepada “sesuatu” yang lain.

Seandainya pandangan kesejarahan dikuasai oleh rasa dendam yang pernah dicetuskan semangat reformasi dipakaikan, maka tampaklah zaman Orde Baru sebagai suatu keutuhan sejarah yang otentik. Dalam suasana dendam ini terbayanglah pula bahwa sudah sejak awal kelahirannya Orde Baru tekah menampilkan dirinya sebagai sebuah negara serakah yang berada di bawah kekuasaan sebuah oligarki politik dan ekonomi yang didukung militer. Tetapi ketika rasa dendam itu telah disisihkan, maka kelihatanlah bahwa ada saat-saat ketika kebebasan berpikir dan berpendapat ditolerir dan bahkan dipelihara. Ketika inilah berbagai pemikiran tentang kenegaraan dan kemasyarakatan ramai didiskusikan, diperdebatkan, dan bahkan dipertengorkan secara terbuka. Apakah pembangunan itu dan apa pulakah corak serta tujuannya? Manakah yang harus didahulukan: “pertumbuhan” atautkah “keadilan ekonomi”? Apakah makna sesungguhnya dari demokrasi dan seberapa lama peranan politik militer yang dominan bisa

dipertahankan? Dan sekian banyak lagi. Memang ada saat ketika suasana Orde Baru terasa sebagai suatu *honeymoon* demokrasi yang menjanjikan.

Tetapi kemudian ternyata juga situasi keterbukaan intelektual yang dipelihara ketika sistem kekuasaan yang monolitik sedang diperteguh hanyalah impian yang secercah saja. Pada waktunya atau – kalau suatu kejadian ingin dipakai sebagai *milestone* – segera setelah peristiwa Malari 1974 terjadi proses ke arah terwujudnya negara serakah yang menyebut sistemnya sebagai “demokrasi Pancasila” semakin mekar dan mencapai kedewasaan ketika “asas tunggal Pancasila” diperkenalkan. Ketika hal ini telah terjadi Orde Baru yang menjanjikan dirinya akan setia pada UUD 1945 telah mengalami transformasi menjadi sebuah “negara serakah”.

Jika saja prasangka baik dipakaikan, maka tampak juga bahwa Orde Baru tidak pernah melupakan tiga asumsi dasar yang dipelihara sejak awal kehadirannya. Pertama, negara jangan lagi membiarkan dirinya senantiasa diguncang oleh ketidakstabilan politik, karena adanya persaingan partai dan ideologi. Kedua, jangan lagi terjadi bunuh-bunuhan sesama anak bangsa karena adanya golongan yang “anti agama”. Ketiga, keasyikan dalam suasana revolusi hanya berarti memperpanjang penderitaan rakyat. Maka begitulah, dengan pemahaman ini jumlah partai pun disederhanakan, tingkah lakunya pun dikontrol serta ideologi dasar dari semua organisasi massa pun disatukan saja, yaitu Pancasila. Sudah sejak kelahirannya Orde Baru seakan-akan memaksakan semua warganegara untuk menjadi penganut salah satu agama resmi, sedangkan partai politik yang dianggap anti-agama dilarang. Selanjutnya, pembangunan nasional pun digalakkan. Terlepas dari segala kritik yang telah dan akan selalu dilancarkan tentang KKN yang terjadi, tetapi Orde Baru adalah rezim kedua, setelah rezim kolonial, yang mengubah peta Indonesia. Berapa kota baru yang sempat didirikan, berapa kota lama yang telah diperluas, berapa jalan dan jembatan yang telah dibuat, dan seterusnya.

Tetapi begitulah, ketika pilihan strategi dan kebijakan untuk mengatasi kesemuanya telah dibuat, maka bukan saja politik dan ekonomi harus dikuasai, hegemoni wacana dan makna kata pun diperkenalkan. Jika hal ini saja belum cukup, ingatan kolektif bangsa pun dikuasai juga – ada peristiwa yang diingat dan bahkan dirayakan tetapi ada juga yang sebaiknya dilupakan bahkan ada kalanya dinista. Untuk keperluan itulah demokrasi prosedural, yang secara resmi disebut “Demokrasi Pancasila”, diperlakukan, sedangkan demokrasi yang substansial, yang telah dicerca sebagai demokrasi liberal, biarlah tinggal sebagai kenangan sejarah saja. Tanpa menyebutkannya tetapi dalam situasi ini Kepala Negara praktis bukan saja tampil sebagai seorang *Enlightened Despot* – kalau istilah dari sejarah Eropa boleh dipakai tentang penguasa otoriter yang masih memperhatikan kehidupan rakyatnya – tetapi adalah juga *the High Priest of Pancasila*, sang penentu mana yang syah secara ideologis dan mana pula yang tidak.

Sistem yang dikembangkan Orde Baru ini menghadapkan para pemimpin dan pemikir serta politisi Islam – seperti juga dialami oleh kelompok yang bertolak dari kesadaran agama dan kultural lain – pada suasana dilematis yang tak mudah. Di satu pihak segala hasrat dan landasan ideologis dan politik dikekang, tetapi di pihak lain negara memberi kelonggaran dan bahkan membantu aktivitas sosial dan kultural. MTQ nasional, yang mempersatukan umat dalam suatu festival keagamaan, diselenggarakan dengan biaya negara. Tidak kurang pentingnya, pendalaman serta perluasan jangkauan agama dalam kehidupan sosial pun terjadi juga. Dalam

suasana inilah para ulama dan pemimpin Islam serta organisasi Islam seakan-akan diharuskan untuk “meninggalkan negara dan kembali kepada umat”. Ketika inilah “*fastabiqul khairat*” menjadi semboyan dan seruan akan *dakwah bil hal* dikumandangkan pula. Kesemuanya membayangkan suasana seakan-akan suatu paradigma baru dalam kehidupan keagamaan dalam konteks kenegaraan telah terjadi. Islam adalah agama suci bagi kemaslahatan umat manusia dan alam semesta, bukan lagi kekuatan yang ingin menghadapkan dirinya pada penentuan tempat dalam sistem kekuasaan. Siapa dan golongan mana yang keluar dari paradigma ini tersingkir atau disingkirkan sebagai “golongan sempalan”. Hanya saja, ketika ini pula sistem wacana Islam dan lainnya yang halus dan *subtle*, yang masih menginginkan adanya alternatif lain, dikembangkan pula. Maka percaturan pemikiran pun terus berlanjut tentang tantangan masa kini dan harapan masa depan umat. Tetapi begitulah, meskipun telah diharuskan terungkit dari aspirasi dan percaturan politik yang riil, umat Islam mendapatkan berbagai hal yang telah lama juga diperjuangkan. Pengadilan agama, kodifikasi fikih, dan entah apalagi, seperti pernah dikatakan Menteri Agama (almarhum Munawir Syadzali), adalah hal-hal yang gagal didapatkan partai-partai Islam, tetapi menjadi kenyataan dalam Orde Baru. Ketika ini pula sebuah organisasi yang menggabungkan berusaha seluruh spektrum penghadapan dan bahkan juga tingkat keakraban pribadi pada agama dan sekaligus juga kepada rezim yang berkuasa didirikan.

Tetapi apakah semua ini riil atau hanyalah *façade* yang menyembunyikan realitas yang sesungguhnya? Ketika seakan-akan dengan tiba-tiba krisis ekonomi moneter yang serius datang melanda segala hal yang dipelihara rezim penguasa dengan begitu saja jatuh porak poranda. Desakan masyarakat yang dimotori para mahasiswa terlalu berat untuk diatasi. Tiba-tiba Orde Baru, sebuah negara serakah yang tampaknya sedemikian kuat, dengan begitu saja tumbang. Maka reformasi politik pun dijalankan, proses demokratisasi, yang sempat terhenti selama empat puluh tahun, dimulai kembali, kebebasan berpendapat diperkenalkan dan segala tuntutan ideologis dan politik yang tersurat dan tersirat dalam Pembukaan UUD mulai ingin diperlakukan. Meskipun reputasi negara sempat babak belur, akhirnya Timor Timur pun dilepaskan. Bukankah kalimat pertama Pembukaan UUD mengatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak semua bangsa” dan bukankah pula konsep bangsa berdasarkan definisi yang diberikan pada komunitas sendiri? Dalam suasana peralihan ini pulalah segala unsur konflik, yang selama ini tertutup oleh sistem kekuasaan yang mengingkari keabsyahan perbedaan dan yang memaksakan konsensus sebagai keharusan yang mutlak, mencuat keluar. Tragedi dalam kehidupan bangsa pun terjadi ketika wibawa negara, yang telah sangat memperkuat dirinya dengan melemahkan masyarakat, mengalami kemesotan. Unsur-unsur konflik yang telah bersemi dalam tata kehidupan masyarakat karena berbagai ketimpangan ekonomi dan keterbatasan kesempatan politik kini telah saling bertabrakan. Unsur-unsur konflik ini keluar ketika sistem masyarakat, yang mempunyai sistem pertahannya masing-masing, telah lebih dulu diperlemah dan dikebiri oleh negara yang maha sentralistik. Maka bangsa menangis sendu ketika di sana-sini konflik horizontal yang keras terjadi dengan memakaikan argumen dan dasar agama sebagai landasan. Ternyata juga salah satu hasrat untuk mendapatkan kemerdekaan – sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD – “mencerdaskan kehidupan bangsa” – selama ini hanyalah khayal yang nyaris tak pernah terjamah.

Seketika itu pula kesamaan paradigma Islam yang pernah dirasakan sebagai suatu cara pandang yang kokoh menjadi buyar begitu saja. Tiba-tiba pula pembagian konvensional umat Islam yang

bermula sejak awal abad 20 sebagai terdiri atas atas golongan “modernis” atau “reformis” dan “tradisionalis” dan yang diwujudkan dalam sistem kepartaian dan organisasi segera menjadi kategori yang kehilangan arti. Dengan begitu saja berbagai komunitas dan alur berpikir yang menyatakan diri sebagai bertolak dari ajaran Islam memperlihatkan sebuah spektrum yang teramat panjang – dari ujung yang paling dan sangat terkiri – yang menampilkan diri sebagai satu-satunya wakil dari Islam yang otentik, murni, kaffah, dan universal – sampai yang paling dan sangat terkanan – yang mengartikan Islam sebagai agama yang tak terlepas dari dinamika dan keharusan sejarah. Kalau dalam sikap dan perilaku sosial dan politik muncul golongan yang memaksakan keharusan berlakunya pandangannya tentang apa yang baik dan buruk – jika perlu, bahkan sering juga, melalui kekerasan – maka dalam pemikiran tampil golongan yang mengingkari keabsyahan negara modern dan mencitakan kembalinya kekhalifahan yang merangkul seluruh dunia Islam. Jika hal ini saja belum cukup, kecenderungan yang bertolak dari kesadaran kultural lokal bahkan juga keeksentrikan sang pemimpin muncul juga di sana dan di sini. Barulah sekarang pula terorisme dengan memakai nama Islam mengotori dengan keji persada tanah air. Barulah sekarang pula golongan yang dianggap “salah” secara doktrin diperlakukan dengan kekerasan, suatu perlakuan yang bahkan seakan-akan dibenarkan oleh lembaga yang diharapkan memancarkan kearifan umat. Dalam situasi ini, yang berada di tengah hanya menjadi apa yang disebut seorang tokoh asing tentang negerinya sebagai “*the silent majority*” yang terjepit.

Sementara itu, berakhirnya sistem pemerintahan yang sentralistis dan diperkenalkannya otonomi daerah ternyata bukan sekadar mendekatkan negara pada rakyat, tetapi juga memberi kemungkinan terjadinya penetrasi negara ke dalam kehidupan dan sistem nilai masyarakat. Sebagaimana yang terjadi di sekian banyak kabupaten, bahkan juga di beberapa propinsi, negara – dan ironisnya dengan persetujuan DPRD yang dipilih rakyat – mengeluarkan peraturan yang praktis meng-kriminal-kan seseorang yang dianggap gagal memenuhi harapan ideal masyarakat. Maka kita pun berkenalan dengan sekian banyak apa yang disebut Perda Syariah, yang praktis telah mengabil wilayah otentik dari kehidupan dan sistem nilai masyarakat. Biarlah para ahli ilmu politik dan hukum menggeleng-gelengkan kepala mereka, ketika batas-batas kategori negara dan masyarakat telah dibiarkan campur aduk di saat proses ke arah demokratisasi yang sehat dan kreatif sama-sama diinginkan untuk berjalan lancar.

Maka begitulah, serentetan pertanyaan, yang bersifat imperatif, tertanyakan juga. Apakah kesemuanya harus dibiarkan terjadi sampai tiba saatnya untuk berhenti secara alamiah? Sebuah pertanyaan bernada sinis, memang, tetapi apakah yang akan ditanyakan ketika berbagai faktor penghambat pandangan telah semakin tinggi juga berdiri di hadapan mata? Bukankah konflik antara “cicak” dan “buaya” dan segala kaitannya dengan berbagai ketentuan dan gejala hukum, politik dan bahkan juga sosial, sedemikian dominan menghambat pandangan kita pada yang lain? Bukankah pula kisah “Prita Mulyasari” dan “mbok Minah”, yang dengan begitu saja menyentuh rasa keadilan, terasa sekali sebagai wakil dari segala ketidakwajaran dalam kesadaran dan pola perilaku di negeri tercinta ini?

Dalam situasi seperti ini, ketika kehidupan demokrasi masih bernafas – entah untuk berapa lama – terasalah pula betapa pentingnya pesan Islam sebagai rahmat Allah disampaikan dalam berbagai corak wacana dan dalam setiap tingkat kemusykilan. Ketika batas-batas gaya wacana

pesantren dan non-pesantren telah mengabur, terasalah pula betapa pentingnya kesadaran dan pengetahuan atas batas-batas dari berbagai kategori dalam pola perilaku dan konsep kemasyarakatan dan kenegaraan. Mungkin terasa berlebih-lebihan, tetapi memang bangsa ini kini semakin memerlukan para aktivis dan pemikir muda yang kreatif, yang bisa menggantikan Cak Nur, Gus Dur dan lain-lain. Tantangan semakin berat, tetapi “pemikir” dan “pelaksana” masih berada di dalam wilayah aktivitas yang berbeda. Pemikiran masih belum jauh beranjak dari tahap normatif menuju ke pola tindakan yang strategis dan kreatif.

Akhirul Kalam

Jadi adalah sewajarnya saja, kalau Universitas Paramadina dan Yayasan Paramadina, dua lembaga keilmuan yang didirikan Cak Nur bersama kawan-kawannya, memeringati hari ketika ia melemparkan pernyataan yang bunyinya sangat sederhana tetapi berlatarkan pemikiran yang mendalam dan kepekaan akan suasana zaman. Hari itu bukan saja dimulainya sebuah corak wacana – *discourse* – tetapi tampilnya seorang pemikir dan ulama yang telah siap berdialog dengan berbagai corak perubahan yang masih belum menemukan bentuk. Semoga juga sekian banyak “Cak Nur” baru, meskipun mungkin dengan gaya wacana yang baru, bermunculan di Tanah Air tercinta ini.***

Jakarta, 4 Januari 2010